

BAHAN DIKLAT PROFESI GURU  
SERTIFIKASI GURU RAYON 11 DIY & JATENG

Buku B. 2. 1

# Penyusunan Program BK di Sekolah

---

**Fathur Rahman**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2008

## MODUL MATERI

### PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

|                  |  |
|------------------|--|
| KOMPETENSI DASAR | Peserta mampu memahami dan mengimplementasikan praktik penyusunan dan pengembangan program bimbingan dan konseling yang komprehensif   |
| INDIKATOR        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling (<i>comprehensive school guidance and counseling</i>)</li> <li>2. Peserta mampu mengidentifikasi secara tepat komponen-komponen program bimbingan dan konseling yang komprehensif</li> <li>3. Peserta memahami secara mendalam urgensi manajemen program dan layanan dalam bimbingan dan konseling</li> <li>4. Peserta dapat mendemonstrasikan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah</li> </ol> |
| KOMPONEN MATERI  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling</li> <li>2. Komponen-komponen program bimbingan dan konseling komprehensif</li> <li>3. Manajemen bimbingan dan konseling</li> <li>4. Praktik penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah</li> </ol>  |
| METODE           | Brainstorming, Diskusi Kelompok, dan Penjelasan Materi   |
| ALOKASI WAKTU    | 300 menit  |
| BAHAN DAN ALAT   | Kertas Flip-Chart, Spidol, kertas meta-plan, Slide power point   |

#### A. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang bimbingan dan konseling (selanjutnya baca; BK) sebagai suatu sistem dan kerangka kerja kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari pandangan umum bahwa layanan BK merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Di Amerika Serikat, latar kelahiran BK secara historis bermula dari keprihatinan yang mendalam dari kalangan dunia pendidikan terhadap carut-marutnya perkembangan

kepribadian generasi muda terutama kalangan pelajar di sekolah yang terkena dampak gelombang besar industrialisasi di kota-kota besar; jumlah siswa *drop-out* meningkat (kaum muda lebih memilih bekerja ketimbang sekolah, sementara keterampilan kerja tidak memadai), pergeseran nilai dalam keluarga dan masyarakat, urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota, dan problem-problem sosial yang lain (Gysbers & Henderson, 2006).

Kenyataan tersebut akhirnya memicu tumbuhnya layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu gerakan sosial yang selaras dengan gerakan kemajuan (*progressive movement*) yang berkembang dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat pada saat itu yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pendidikan saat itu, seperti Frank Parsons, Charles Merrill, Meyer Blommfield, Jesse B. Davis, Anna Reed, E. W. Weaver dan David Hill (Gysbers & Henderon, 2006; Gunawan, 2001). Para tokoh tersebut sama-sama memandang secara kritis bahwa gelombang revolusi industri yang membawa dampak negatif bagi perkembangan generasi muda harus dicegah.

Gerakan bimbingan yang muncul di AS dalam bentuk bimbingan pekerjaan (*vocational guidance*) tersebut membawa pengaruh besar terhadap banyak negara lainnya, seperti Filipina, Malaysia, India, dan tidak terkecuali Indonesia. Gunawan (2001, 22) menjelaskan bahwa pada periode awal kemerdekaan masalah bimbingan pekerjaan baru diperhatikan oleh jawatan yang mengurus masalah tenaga kerja. Kegiatan bimbingan kemudian dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan mengembangkan banyak kursus keterampilan bagi kaum muda. Baru pada tahun 1962, ada kebijakan SMA Gaya Baru yang mulai menggeser bimbingan pekerjaan ke arah bimbingan akademik. Secara formal, pemberlakuan kurikulum 1975 mengandung penegasan bahwa BK (saat itu disebut bimbingan dan penyuluhan) merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah.

Lahirnya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tahun 1975 di Malang, Jawa Timur dan pergantian nama IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tahun 2001 dengan kelengkapan divisi-divisi layanan di dalamnya semakin memperkokoh layanan BK dengan berbagai domain layanan yang semakin kompleks; pribadi, sosial, akademik, karir dan layanan pendukung lainnya.

Dengan ruang lingkup layanan yang semakin luas dan kompatibilitas tujuan dengan tujuan pendidikan, pengelolaan dan pengembangan BK sebagai suatu program tidaklah mungkin dilakukan dengan cara yang sederhana dan terkesan asal jalan begitu saja. Jika petugas BK dan konselor menginginkan capaian dan target yang betul-betul maksimal dan mampu memunculkan perubahan-perubahan yang positif dalam diri peserta didik, maka pengelolaan dan pengembangan program ataupun layanan BK harus memanfaatkan pendekatan manajemen yang rasional dan ilmiah. Modul ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis berupa langkah-langkah praktikal dalam menyusun dan mengembangkan program BK. Lebih daripada itu,

petugas BK dan konselor perlu memiliki penguasaan yang memadai tentang asumsi pokok, prinsip dasar, serta acuan konseptual yang melatarbelakangi penyusunan suatu program.

## **B. LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH KOMPREHENSIF (COMPREHENSIVE SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING)**

Bercermin pada latar sejarah kelahiran dan perkembangan BK tersebut, dewasa ini muncul istilah *comprehensive school guidance and counseling* sebagai kerangka kerja utuh yang harus dipahami oleh tenaga-tenaga ahli di bidang BK (Gysbers & Henderson, 2006; Ming, et. al., 2004; Bowers & Hatch, 2000). Berikut lima premis dasar yang menegaskan istilah tersebut (Gysbers & Henderson, 2006);

1. Tujuan BK bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan. Artinya; dalam pendidikan ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan BK harus diarahkan pada upaya membantu siswa dalam pencapaian standar kompetensi dimaksud.
2. Program BK bersifat pengembangan (*based on developmental approach*), yakni; meskipun seorang konselor dimungkinkan untuk mengatasi problem dan kebutuhan psikologis yang bersifat krisis dan klinis, pada dasarnya fokus layanan BK lebih diarahkan pada usaha memfasilitasi pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang membantu siswa untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang mandiri.
3. Program BK melibatkan kolaborasi antar staff (*team-building approach*), yaitu program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif bersandar pada asumsi bahwa tanggung jawab kegiatan bimbingan melibatkan seluruh personalia yang ada di sekolah dengan sentral koordinasi dan tanggung jawab ada di tangan konselor yang bersertifikasi (*certified counselors*). Konselor tidak hanya menyediakan layanan langsung untuk siswa, melainkan juga bekerja secara konsultatif dan kolaboratif dengan tim bimbingan yang lain, staf personel sekolah yang lain (guru dan tenaga administrasi), bahkan orangtua dan masyarakat.
4. Program BK dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut diharapkan kegiatan dan layanan BK dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur.
5. Program BK ditopang oleh kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian kinerja program BK

Bowers dan Hatch (2000, 11) bahkan menegaskan bahwa program bimbingan dan konseling sekolah tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif dalam disain, dan bersifat pengembangan dalam tujuannya (*comprehensive in scope, preventive in design, and developmental in nature*). *Pertama*, bersifat komprehensif berarti program BK harus mampu memfasilitasi capaian-capaian perkembangan psikologis siswa dalam totalitas aspek bimbingan (baik pribadi-sosial, akademik, dan karir). Layanan yang diberikan pun tidak hanya terbatas pada siswa dengan karakter dan motivasi unggul serta siap belajar saja. Layanan BK ditujukan untuk seluruh siswa tanpa syarat apapun. Dengan harapan, setiap siswa dapat menggapai sukses di sekolah dan menunjukkan kontribusi nyata dalam masyarakat.

*Kedua*, bersifat preventif dalam disain mengandung arti bahwa pada dasarnya tujuan pengembangan program BK di sekolah hendaknya dilakukan dalam bentuk yang bersifat preventif. Upaya pencegahan dan antisipasi sedini mungkin (*prevention education*) hendaknya menjadi semangat utama yang terkandung dalam kurikulum bimbingan yang diterapkan di sekolah (kegiatan klasikal). Melalui cara yang preventif tersebut diharapkan siswa mampu memilah sikap dan tindakan yang tepat dan mendukung pencapaian perkembangan psikologis ke arah yang ideal dan positif. Beberapa program yang dapat dikembangkan seperti pendidikan multikulturalisme dan antikekerasan, mengembangkan keterampilan resolusi konflik, pendidikan seksualitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

*Ketiga*, bersifat pengembangan dalam tujuan didasari oleh fakta di lapangan bahwa layanan bimbingan dan konseling sekolah selama ini justru kontraproduktif terhadap perkembangan siswa itu sendiri. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling sekolah yang berkembang di Indonesia selama ini lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif dan klerikal (Kartadinata, 2003), seperti mengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa, mengenakan sanksi disiplin pada siswa yang terlambat dan dianggap nakal. Dengan demikian, wajar apabila dalam masyarakat dan bagi siswa-siswa sendiri guru bimbingan dan konseling distigmakan sebagai polisi sekolah. Konsekuensi kenyataan ini, pada akhirnya menyebabkan layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di sekolah akhirnya terjebak dalam pendekatan tradisional dan intervensi psikologis yang berorientasi pada paradigma intrapsikis dan sindrom klinis.

Pendekatan dan tujuan layanan bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perilaku menyimpang (*maladaptive behavior*) dan bagaimana mencegah penyimpangan perilaku tersebut, melainkan juga berurusan dengan pengembangan perilaku efektif (Kartadinata, 1999; Kartadinata, 2003; Galassi & Akos, 2004). Sudut pandang perkembangan ini mengandung implikasi luas bahwa

pengembangan perilaku yang sehat dan efektif harus dapat dicapai oleh setiap individu dalam konteks lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, bimbingan dan konseling seharusnya perlu diarahkan pada upaya memfasilitasi individu agar menjadi lebih sadar terhadap dirinya, terampil dalam merespon lingkungan, serta mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang bermakna dan berorientasi ke depan (Kartadinata, 1999; Kartadinata, 2003).

### C. KOMPONEN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

Dalam buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan BK dalam Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2007) dijelaskan bahwa program BK mengandung empat komponen pelayanan, yaitu 1) pelayanan dasar bimbingan; 2) pelayanan perencanaan individual; 3) pelayanan responsif; dan 4) dukungan sistem. Adapun pengertian tiap-tiap komponen pelayanan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pelayanan Dasar

##### a. Pengertian

Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Di Amerika Serikat sendiri, istilah pelayanan dasar ini lebih populer dengan sebutan kurikulum bimbingan (*guidance curriculum*). Tidak jauh berbeda dengan pelayanan dasar, kurikulum bimbingan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dalam diri siswa yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangannya (Bowers & Hatch, 2000)

Penggunaan instrumen asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembangan pengalaman terstruktur yang disebutkan.

##### b. Tujuan

Pelayanan ini bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain

membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar (1) memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.

### c. Fokus pengembangan

Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya (sebagai standar kompetensi kemandirian). Materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup pengembangan: (1) *self-esteem*, (2) motivasi berprestasi, (3) keterampilan pengambilan keputusan, (4) keterampilan pemecahan masalah, (5) keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, (6) kesadaran keragaman budaya, dan (7) perilaku bertanggung jawab. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir (terutama di tingkat SLTP/SLTA) mencakup pengembangan: (1) fungsi agama bagi kehidupan, (2) pemantapan pilihan program studi, (3) keterampilan kerja profesional, (4) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-rohaniyah) dalam menghadapi pekerjaan, (5) perkembangan dunia kerja, (6) iklim kehidupan dunia kerja, (7) cara melamar pekerjaan, (8) kasus-kasus kriminalitas, (9) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan (10) dampak pergaulan bebas.

## 2. Pelayanan Responsif

### a. Pengertian

Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orangtua, guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan dalam pelayanan responsif.

### b. Tujuan

Tujuan pelayanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan.

### c. Fokus pengembangan

Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah dan kebutuhan konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya secara positif. Kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk memperoleh informasi antara lain tentang pilihan karir dan program studi, sumber-sumber belajar, bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika, pergaulan bebas.

Masalah lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang dirasakan mengganggu kenyamanan hidup atau menghambat perkembangan diri konseli, karena tidak terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Masalah konseli pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang ditampilkannya.

Masalah (gejala perilaku bermasalah) yang mungkin dialami konseli diantaranya: (1) merasa cemas tentang masa depan, (2) merasa rendah diri, (3) berperilaku impulsif (kekanak-kanakan atau melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkannya secara matang), (4) membolos dari Sekolah/Madrasah, (5) malas belajar, (6) kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, (7) kurang bisa bergaul, (8) prestasi belajar rendah, (9) malas beribadah, (10) masalah pergaulan bebas (*free sex*), (11) masalah tawuran, (12) manajemen stress, dan (13) masalah dalam keluarga.

Untuk memahami kebutuhan dan masalah konseli dapat ditempuh dengan cara asesmen dan analisis perkembangan konseli, dengan menggunakan berbagai teknik, misalnya inventori tugas-tugas perkembangan (ITP), angket konseli, wawancara, observasi, sosiometri, daftar hadir konseli, leger, psikotes dan daftar masalah konseli atau alat ungkap masalah (AUM).

## 3. Perencanaan Individual

**a. Pengertian**

Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam dengan segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki konseli amat diperlukan sehingga konseli mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus konseli. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan di dalam implementasi pelayanan ini.

**b. Tujuan**

Perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar (1) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya.

Tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial-pribadi oleh dirinya sendiri. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan konseli untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu seluruh konseli, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing konseli.

Melalui pelayanan perencanaan individual, konseli diharapkan dapat:

- 1) Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang Sekolah/Madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya.
- 2) Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya.
- 3) Mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya.

- 4) Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya.

**c. Fokus pengembangan**

Fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial-pribadi. Secara rinci cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek (1) akademik meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat; (2) karir meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif; dan (3) sosial-pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positif, dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif.

**4. Dukungan Sistem**

Ketiga komponen diatas, merupakan pemberian bimbingan dan konseling kepada konseli secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli.

Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan diatas. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di Sekolah/Madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek: (a) pengembangan jejaring (*networking*), (b) kegiatan manajemen, (c) riset dan pengembangan.

**a. Pengembangan Jejaring (*networking*)**

Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor yang meliputi (1) konsultasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, (3) berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Sekolah/Madrasah, (4) bekerjasama dengan personel Sekolah/Madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli, (5) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, dan (6) melakukan

kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling.

**b. Kegiatan Manajemen**

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan (1) pengembangan program, (2) pengembangan staf, (3) pemanfaatan sumber daya, dan (4) pengembangan penataan kebijakan.

1) Pengembangan Profesionalitas

Konselor secara terus menerus berusaha untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya melalui (a) in-service training, (b) aktif dalam organisasi profesi, (c) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah; seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (d) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana).

2) Pemberian Konsultasi dan Berkolaborasi

Konselor perlu melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan guru, orang tua, staf Sekolah/Madrasah lainnya, dan pihak institusi di luar Sekolah/ Madrasah (pemerintah, dan swasta) untuk memperoleh informasi, dan umpan balik tentang pelayanan bantuan yang telah diberikannya kepada para konseli, menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli, melakukan referal, serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Dengan kata lain strategi ini berkaitan dengan upaya Sekolah/Madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Jaringan kerjasama ini seperti dengan pihak-pihak (1) instansi pemerintah, (2) instansi swasta, (3) organisasi profesi, seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), (4) para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan orang tua konseli, (5) MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling), dan (6) Depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan).

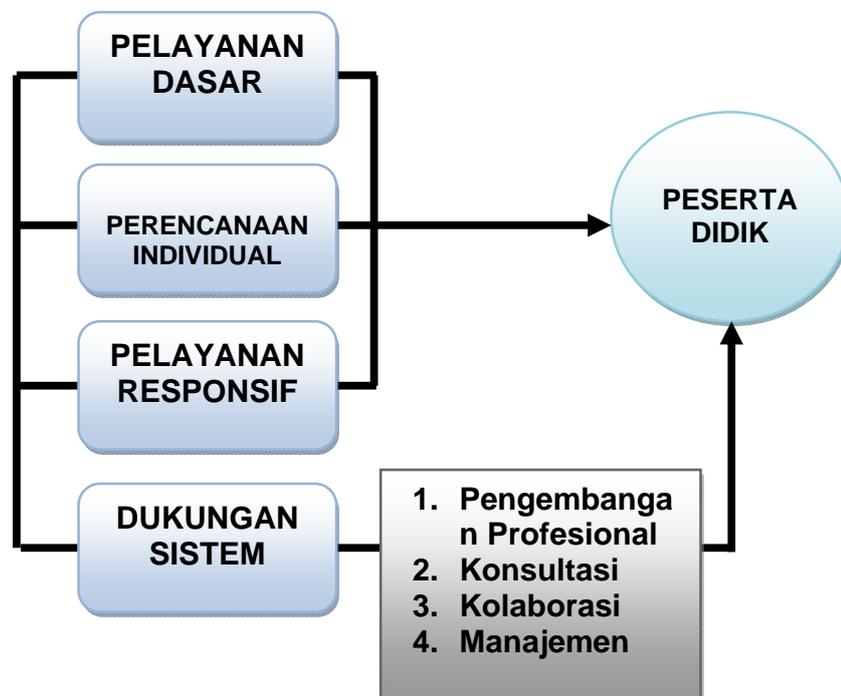
3) Manajemen Program

Suatu program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan (manajemen) yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Keterkaitan antar komponen pelayanan

dan strategi peluncurannya dapat disimak pada gambar 2 kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling.

Keempat komponen pelayanan BK yang meliputi pelayanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsive, dan dukungan sistem dapat digambarkan dalam bentuk matriks sederhana berikut ini:

**Gambar 1. Komponen Program Bimbingan dan Konseling**

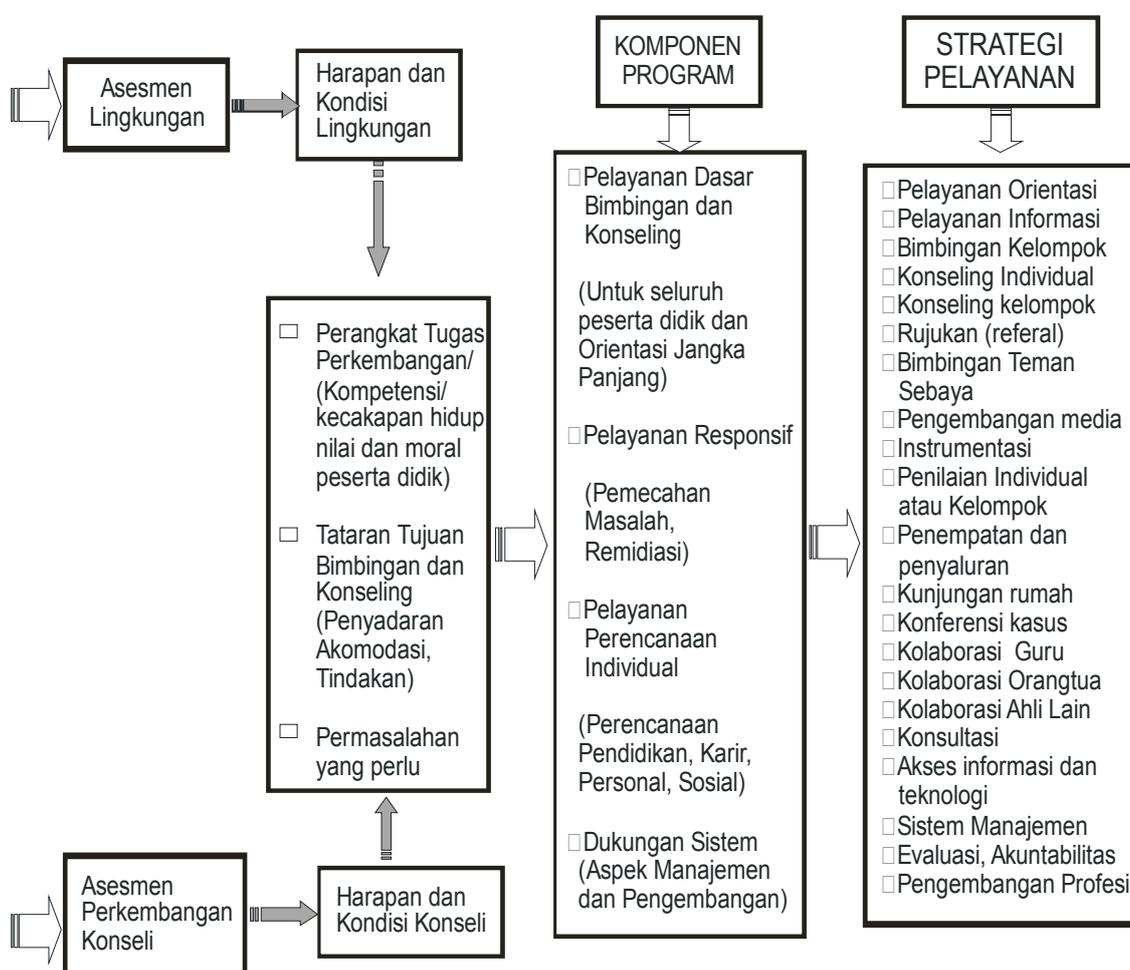


Setelah komponen-komponen utama pelayanan dipahami hakikat, tujuan, dan fokus pengembangannya, yang penting untuk dideskripsikan lebih lanjut adalah keterkaitan antara komponen dengan strategi pelayanan yang akan digunakan. Keterkaitan antara keduanya menjadi satu kerangka utuh program yang memberikan landasan bagi konselor tentang bagaimana cara menggerakkan suatu program atau layanan BK.

Kerangka kerja utuh BK ini memberikan gambaran bahwa suatu program hendaknya dimulai dari penilaian terhadap kebutuhan peserta didik maupun kebutuhan lingkungannya. Melalui penilaian tersebut, konselor maupun petugas BK

dapat memahami bahwa baik peserta didik maupun lingkungan memiliki tuntutan dan harapan yang tidak dapat diabaikan satu dengan yang lain. Harapan-harapan tersebut lebih lanjut dapat dirumuskan dalam bentuk seperangkat tugas perkembangan dan kompetensi yang akan dicapai serta tujuan-tujuan perubahan yang diinginkan. Secara skematis, kerangka kerja tersebut sebagaimana terlihat pada gambar 2 berikut ini:

**Gambar 2. Kerangka Kerja Utuh Bimbingan dan Konseling**



Strategi pelayanan untuk masing-masing komponen program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pelayanan dasar**
  - a. Bimbingan Kelas

Program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau *brain storming* (curah pendapat).

b. Pelayanan Orientasi

Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan Sekolah/Madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Pelayanan orientasi ini biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Materi pelayanan orientasi di Sekolah/Madrasah biasanya mencakup organisasi Sekolah/Madrasah, staf dan guru-guru, kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana, dan tata tertib Sekolah/Madrasah.

c. Pelayanan Informasi

Yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. melalui komunikasi langsung, maupun tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik, seperti : buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet).

d. Bimbingan Kelompok

Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil (5 s.d. 10 orang). Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini, adalah masalah yang bersifat umum (*common problem*) dan tidak rahasia, seperti : cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, dan mengelola stress.

e. Pelayanan Pengumpulan Data (Aplikasi Instrumentasi)

Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik, dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.

## 2. Pelayanan responsif

a. Konseling Individual dan Kelompok

Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik (konseli)

dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

b. Referral (Rujukan atau Alih Tangan)

Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mereferral atau mengalih-tangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Konseli yang sebaiknya direferral adalah mereka yang memiliki masalah, seperti depresi, tindak kejahatan (kriminalitas), kecanduan narkoba, dan penyakit kronis.

c. Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas

Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah peserta didik, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek itu di antaranya : (1) menciptakan iklim sosio-emosional kelas yang kondusif bagi belajar peserta didik; (2) memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam; (3) menandai peserta didik yang diduga bermasalah; (4) membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program *remedial teaching*; (5) mereferral (mengalih-tangankan) peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing; (6) memberikan informasi yang *up to date* tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati peserta didik; (7) memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada peserta didik tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja); (8) menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual (hal ini penting, karena guru merupakan "figur central" bagi peserta didik); dan (9) memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif.

d. Kolaborasi dengan Orang tua

Konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di Sekolah/Madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan

orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi peserta didik. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti: (1) kepala Sekolah/Madrasah atau komite Sekolah/Madrasah mengundang para orang tua untuk datang ke Sekolah/Madrasah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) Sekolah/Madrasah memberikan informasi kepada orang tua (melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik, dan (3) orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke Sekolah/Madrasah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya.

- e. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar Sekolah/Madrasah  
Yaitu berkaitan dengan upaya Sekolah/Madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Jaringan kerjasama ini seperti dengan pihak-pihak (1) instansi pemerintah, (2) instansi swasta, (3) organisasi profesi, seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), (4) para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti psikolog, psikiater, dan dokter, (5) MGP (Musyawarah Guru Pembimbing), dan (6) Depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan).
- f. Konsultasi  
Konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan Sekolah/Madrasah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik, menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referal, dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling.
- g. Bimbingan Teman Sebaya (*Peer Guidance/Peer Facilitation*)  
Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah

peserta didik yang perlu mendapat pelayanan bantuan bimbingan atau konseling.

h. Konferensi Kasus

Yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik itu. Pertemuan konferensi kasus ini bersifat terbatas dan tertutup.

i. Kunjungan Rumah

Yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani, dalam upaya menggentaskan masalahnya, melalui kunjungan ke rumahnya.

### 3. Perencanaan individual

Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Pelayanan perencanaan individual ini dapat dilakukan juga melalui pelayanan penempatan (penjurusan, dan penyaluran), untuk membentuk peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Konseli menggunakan informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan dan karir yang diperolehnya untuk (1) merumuskan tujuan, dan merencanakan kegiatan (alternatif kegiatan) yang menunjang pengembangan dirinya, atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya; (2) melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan, dan (3) mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya.

### 4. Dukungan sistem

a. Pengembangan Profesi

Konselor secara terus menerus berusaha untuk “meng-update” pengetahuan dan keterampilannya melalui (1) *in-service training*, (2) aktif dalam organisasi profesi, (3) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (4) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana).

b. Manajemen Program

Program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program Sekolah/Madrasah dengan dukungan wajar baik dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia (konselor), sarana, dan pembiayaan.

#### **D. PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH KOMPREHENSIF**

Melalui pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang asumsi pokok program BK yang bersifat komprehensif dan penjabaran dalam komponen-komponen program, maka konselor diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan rencana aksi layanan BK dengan tujuan dan target terukur serta berdasarkan skala prioritas layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang konselor harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan-tujuan yang akan ditetapkan dalam perencanaan program BK harus menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan visi/misi yang ada di sekolah secara khusus. Dengan demikian, petugas bimbingan dan konseling mampu dengan tepat menentukan bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan beserta sarana-sarana yang diperlukannya.

##### **D.1. Bimbingan dan Konseling sebagai Sistem dan Subsistem**

Berdasarkan asumsi dasar tentang sifat menyeluruh (komprehensif) program BK, kegiatan BK merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling bertalian, sambung-menyambung, dan setiap bagian memiliki ikatan kesatuan dengan bagian yang lain yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, kegiatan BK dapat dianggap sebagai subsistem dalam sistem pendidikan yang menjadi induknya. Rangkaian kegiatan BK pada akhirnya memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan rangkaian kegiatan sekolah lainnya.

Sementara itu, BK sebagai suatu sistem memiliki tiga aspek utama (Gunawan, 2001), yakni:

- a) Tujuan yang hendak dicapai sebagai aspek utama yang harus ditentukan terlebih dahulu. Penetapan tujuan akan memudahkan konselor menentukan strategi yang akan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud
- b) Kegiatan pokok yang menunjang langsung tercapainya tujuan. Bagian-bagian pokok dari suatu sistem dan strategi yang dikembangkan biasanya disebut

sebagai penjabaran aktivitas dari suatu strategi yang di dalamnya terdapat aktivitas utama yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, tercapainya tujuan hanya mungkin terjadi melalui implementasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan sebaiknya dirumuskan secara tepat sasaran dan dengan dampak yang terukur

- c) Implementasi kegiatan (proses) atau berfungsinya isi dari suatu strategi yang mengarah pada pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan semaksimal mungkin harus diusahakan dapat terlaksana sebaik mungkin.

Ketiga aspek dari program BK sebagai sistem tersebut saling berkaitan dan satu kesatuan organis yang berproses menuju tujuan layanan ataupun program yang hendak dicapai. Dalam rangka itu, modul materi ini bermuara pada fasilitas keterampilan praktis bagi konselor tentang prosedur penyusunan program BK yang memperhatikan berbagai asumsi dasar dan komponen layanan yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **D.2. Sistematika Penyusunan dan Pengembangan Program BK**

Sistematika penyusunan dan pengembangan program BK Sekolah yang komprehensif pada dasarnya terdiri dari dua langkah besar, yaitu: a) pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan; dan b) desain program yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Adapun penjabaran dari tiap-tiap langkah besar sebagai berikut:

### **a. Pemetaan Kebutuhan, Masalah, dan Konteks Layanan**

Penyusunan program BK di sekolah haruslah dimulai dari kegiatan asesmen (pengukuran, penilaian) atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program/layanan (Depdiknas, 2007). Kegiatan asesmen ini meliputi (1) asesmen konteks lingkungan program yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan dan tujuan sekolah, orangtua, masyarakat, dan stakeholder pendidikan terlibat, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, serta kebijakan pimpinan sekolah; (2) asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik; seperti aspek fisik (kesehatan dan keberfungsian), kecerdasan, motivasi, sikap dan kebiasaan belajar, minat, masalah-masalah yang dihadapi, kepribadian, tugas perkembangan psikologis.

Melalui pemetaan ini diharapkan program dan layanan BK yang dikembangkan oleh konselor benar-benar dibutuhkan oleh seluruh segmen yang terlibat dan sesuai dengan konteks lingkungan program. Dengan kata

lain, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana per semester ataupun tahunan bukan sekedar tuntutan administratif, melainkan tuntutan tanggung jawab yang sungguh harus dilaksanakan secara professional. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh konselor dalam memetakan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan:

- 1) Menyusun instrumen dan unit analisis penilaian kebutuhan. Eksplorasi peta kebutuhan, masalah, dan konteks membutuhkan instrument asesmen yang berfungsi sebagai alat bantu. Dalam instrumen ini, konselor merumuskan aspek dan indicator beserta item pernyataan/pertanyaan yang akan diukur dan jenis metode yang akan digunakan untuk mengungkap aspek dimaksud. Metode yang dapat digunakan, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.
- 2) Implementasi penilaian kebutuhan. Pada tahap ini, konselor sesegera mungkin mengumpulkan data dengan menggunakan instrument yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan memperoleh gambaran kebutuhan dan konteks lingkungan yang akan dirumuskan ke dalam program lebih lanjut
- 3) Analisis hasil penilaian kebutuhan. Setelah data terkumpul, konselor mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi hasil penilaian yang diungkap dengan tujuan kebutuhan, masalah, dan konteks program dapat teridentifikasi dengan tepat
- 4) Pemetaan kebutuhan/permasalahan. Setelah hasil analisis dan identifikasi masalah terungkap, petugas BK dan konselor membuat peta kebutuhan/masalah yang dilengkapi dengan analisis faktor-faktor penyebab yang memunculkan kebutuhan/permasalahan

#### **b. Desain Program BK dan Rencana Aksi (*Action Plan*)**

Berikut ini adalah penjabaran rencana operasional (*action plan*) yang diperlukan *Action plan* yang akan disusun paling tidak memenuhi unsur 5W+1H (*what, why, where, who, when, and how*). Dengan demikian, konselor dan petugas bimbingan perlu melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Identifikasikan dan rumuskan berbagai kegiatan yang harus/perlu dilakukan. Kegiatan ini diturunkan dari perilaku/tugas perkembangan/kompetensi yang harus dikuasai peserta didik
- 2) Pertimbangkan porsi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan di atas. Apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau terus menerus. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam setiap

komponen program perlu dirancang dengan cermat. Perencanaan waktu ini didasarkan kepada isi program dan dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh konselor. Berikut dikemukakan tabel alokasi waktu, sekedar perkiraan atau pedoman relatif dalam pengalokasian waktu untuk konselor dalam pelaksanaan komponen pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah.

#### PERKIRAAN ALOKASI WAKTU PELAYANAN

| KOMPONEN PELAYANAN                               | JENJANG PENDIDIKAN |           |   |
|--|--------------------|-----------|---|
|  | SD/MI              | SMP/MTs   | SMA/MAN/SMK                             |
| 1. Pelayanan Dasar                               | 45 – 55 %          | 35 – 45 % | 25 – 35 %                               |
| 2. Pelayanan Responsif                           | 20 – 30 %          | 25 – 35 % | 15 – 25 %                               |
| 3. Pelayanan Perencanaan Individual dan keluarga | 5 – 10 %           | 15 – 25 % | 25 – 35 % (Porsi untuk SMK lebih besar) |
| 4. Dukungan Sistem                               | 10 – 15 %          | 10 – 15 % | 10 – 15 %                               |

- 3) Inventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari *needs assessment* ke dalam tabel kebutuhan yang akan menjadi rencana kegiatan. Rencana kegiatan dimaksud dituangkan ke dalam rancangan jadwal kegiatan untuk selama satu tahun. Rancangan ini bisa dalam bentuk matrik; Program Tahunan dan Program semester.
- 4) Program bimbingan dan konseling Sekolah/Madrasah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan perlu dijadwalkan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender kegiatan mencakup kalender tahunan, bulanan, dan mingguan.
- 5) Program bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan dalam bentuk (a) kontak langsung, dan (b) tanpa kontak langsung dengan peserta didik. Untuk kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasikal di kelas (pelayanan dasar) perlu dialokasikan waktu terjadwal 2 (dua) jam pelajaran per-kelas per-minggu. Adapun kegiatan bimbingan tanpa kontak langsung dengan peserta didik dapat dilaksanakan melalui tulisan (seperti e-mail, buku-buku, brosur, atau majalah dinding), kunjungan rumah (*home visit*), konferensi kasus (*case conference*), dan alih tangan (*referral*).

## E. PENUTUP

Program yang telah tersusun rapi dalam bentuk rincian aktivitas yang akan dilakukan tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh staff program tidak hanya petugas BK dan konselor, melainkan juga faktor kepemimpinan sekolah yang mendukung. Termasuk pula, keterlibatan guru bidang studi dalam memahami kerangka filosofis dan konseptual program serta layanan BK yang bersifat mendukung program pembelajaran. Melalui dukungan-dukungan tersebut, tujuan-tujuan layanan serta kompetensi yang akan dicapai mampu terwujud secara optimal.

### PENGAYAAN MATERI

1. Buatlah tabel sederhana yang mendeskripsikan hasil pemetaan kebutuhan dan masalah, serta konteks lingkungan pengembangan program. Isilah tabel tersebut dengan asumsi kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di sekolah Anda! (Diskusikan dalam kelompok!)
2. Setelah peta kebutuhan dan permasalahan dibuat, susunlah kegiatan operasional (*action plan*) dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan rincian pelaksanaan program yang akan dijalankan! (Diskusikan dalam kelompok)
3. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing!

## REFERENSI

- Bowers, J. L. & Hatch, P. A. (2000). *The National Model for School Counseling Programs*. American School Counselor Association
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: Penerbit UPI
- Galassi, J. P. & Akos, P. (2004). Developmental Advocacy: Twenty-First Century School Counseling, *Journal of Counseling and Development*, Vol. 82, 2004, p. 146-157
- Gunawan, Y. (2001). *Pengantar Bimbingan dan Konseling; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prehallindo
- Gysbers, N. C. & Henderson, P. (2006). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: American Counseling Association
- Kartadinata, S. (1999). Quality Improvement and Management System Development of School Guidance and Counseling Services, *the Journal of Education*, Vol. 6, December, 1999
- Kartadinata, S. (2003). Bimbingan dan Konseling Perkembangan; Pendekatan Alternatif Bagi Perbaikan Mutu dan Sistem Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. VI/11 Mei 2003
- Ming, L. K., et. al. (2004). *Counselling in Schools; Theories, Processes, and Techniques*. Edited by Esther Tan. Singapore: McGraw-Hill Education (Asia)